

APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI BAPPEDA KABUPATEN MAYBRAT – PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Elyazer Tandisinding¹⁾, Amirul Mustofa²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: elyazer.tandisinding@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan faktor-faktor dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui Aplikasi SIPD untuk meningkatkan akuntabilitas Bappeda Kabupaten Maybrat, serta mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat, dan dampaknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan faktor-faktor perencanaan pembangunan melalui Aplikasi SIPD dapat berjalan meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan SDM dan sinyal internet. Upaya yang dilakukan meliputi penguatan sinyal internet, pelatihan operator SIPD, dan penyelesaian pekerjaan di lokasi dengan sinyal internet yang lebih stabil. Faktor pendukung mencakup kemudahan akses Aplikasi SIPD, integrasi data yang transparan, serta efisiensi anggaran karena pengelolaan sistem ditanggung oleh pemerintah pusat. Namun, penelitian juga mengidentifikasi kendala seperti lemahnya sinyal internet, lambatnya penanganan gangguan aplikasi, dan kurangnya motivasi serta kompetensi pegawai. Rekomendasi meliputi peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, penyusunan SOP, pelatihan pegawai, dan optimalisasi menu Aplikasi SIPD.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Aplikasi SIPD, Perencanaan Pembangunan

Abstract

This study aims to analyze the implementation of factors in the preparation of development planning through the SIPD Application to enhance the accountability of Bappeda Kabupaten Maybrat, as well as to identify supporting factors, obstacles, and their impacts. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection is conducted through observation, interviews, and document studies. Data analysis includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of development planning factors through the SIPD Application can be carried out despite challenges such as limited human resources and weak internet signals. Efforts undertaken include strengthening internet signals, training SIPD operators, and completing tasks in locations with more stable internet connections. Supporting factors include the ease of access to the SIPD Application, transparent data integration, and budget efficiency as the system is managed by the central government. However, the study also identifies obstacles such as weak internet signals, slow handling of application issues, and a lack of motivation and competence among employees. Recommendations include enhancing coordination with the Ministry of Home Affairs, developing standard operating procedures (SOPs), conducting employee training, and optimizing the SIPD Application menu.

Keywords: Accountability, SIPD Application, Development Planning

LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan komponen utama dalam memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah dituntut untuk memiliki rencana pembangunan yang jelas, terukur, berbasis data, dan didorong oleh partisipasi aktif masyarakat. Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, penggunaan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, merupakan salah satu inovasi penting yang bertujuan untuk membantu daerah dalam mengintegrasikan data dan menyusun perencanaan pembangunan dengan cara yang lebih terstruktur dan berbasis pada data yang real-time.

Kabupaten Maybrat, salah satu daerah di Provinsi Papua Barat Daya menghadapi tantangan yang cukup besar dalam merancang kebijakan pembangunan yang efektif. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang luas dan terisolasi, dengan minimnya infrastruktur, terbatasnya aksesibilitas, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang menjadi hambatan utama dalam merancang kebijakan pembangunan yang dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Akses internet yang terbatas juga turut menghambat penggunaan teknologi informasi dalam proses perencanaan. Walaupun demikian, Kabupaten Maybrat memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, seperti hasil hutan, pertanian, dan perikanan, yang jika dikelola dengan baik, dapat mendorong pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan. Komitmen pemerintah daerah yang kuat untuk mengimplementasikan sistem berbasis teknologi diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan ini, serta mendorong pencapaian akuntabilitas yang lebih tinggi dalam perencanaan pembangunan.

Penerapan Aplikasi SIPD di Bappeda Kabupaten Maybrat bertujuan untuk mengoptimalkan integrasi data lintas sektor dan mempercepat proses perencanaan dan pengambilan keputusan. SIPD diharapkan dapat memastikan adanya kesinambungan yang erat antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta memperbaiki koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Lebih dari itu, dengan adanya SIPD, diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih kebijakan yang kerap terjadi antara berbagai OPD, sehingga pengawasan oleh DPRD dan masyarakat juga menjadi lebih transparan dan efektif. Selain itu, sistem ini diharapkan dapat mendorong penerapan pendekatan bottom-up dalam perencanaan pembangunan, yang pada gilirannya dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat lokal.

Namun demikian, meskipun penerapan SIPD menawarkan banyak manfaat, sejumlah tantangan tetap harus dihadapi dalam implementasinya. Salah satunya adalah keterbatasan akses internet di wilayah-wilayah terpencil, yang memperlambat adopsi teknologi ini secara menyeluruh. Selain itu, banyak pegawai yang belum terbiasa menggunakan aplikasi ini karena kurangnya pelatihan, serta masih adanya rendahnya motivasi untuk mengoperasikan sistem secara maksimal. Lebih lanjut, pengembangan aplikasi SIPD yang belum sepenuhnya optimal juga menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas penggunaannya di tingkat daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai hambatan ini, perlu dilakukan upaya strategis yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang lebih intensif, penguatan koordinasi antar sektor terkait, serta pengembangan kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Aplikasi SIPD dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Maybrat, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas sistem ini dalam

meningkatkan akuntabilitas kebijakan daerah. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi konkret yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sistem perencanaan pembangunan berbasis digital, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

LANDASAN TEORITIS

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep fundamental dalam manajemen publik dan pemerintahan yang merujuk pada kewajiban pemerintah untuk memberikan laporan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai penggunaan sumber daya publik dan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat serta lembaga pengawas (Robinson, 2008). Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada legislatif, masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Mulgan (2000), akuntabilitas mencakup dua elemen utama, yaitu tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab merujuk pada kewajiban untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, sedangkan pertanggungjawaban berhubungan dengan kewajiban untuk melaporkan kinerja dan penggunaan sumber daya publik secara terbuka dan transparan.

Penerapan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah memerlukan sistem yang transparan dan mekanisme pengawasan yang efektif. Menurut Peters (2000), akuntabilitas dalam pemerintahan daerah memiliki dua aspek penting, yaitu *input accountability* (akuntabilitas terhadap input sumber daya yang digunakan) dan *output accountability* (akuntabilitas terhadap hasil dari kebijakan atau program yang dilaksanakan). Dalam konteks ini, setiap kebijakan yang diambil oleh

pemerintah daerah harus jelas mengenai sumber daya yang digunakan dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.

Salah satu bentuk akuntabilitas yang semakin berkembang adalah penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan. Teknologi memungkinkan adanya transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan (Heeks, 2006). Di era digital ini, sistem informasi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi alat yang penting dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah.

Menurut Dunning (2009), penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan memiliki potensi besar untuk meningkatkan akuntabilitas melalui penguatan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan kebijakan. Teknologi memungkinkan pemerintah daerah untuk mempublikasikan data secara real-time, yang memudahkan masyarakat dan lembaga pengawas dalam memonitor jalannya program dan anggaran. Selain itu, sistem berbasis teknologi, seperti SIPD, dapat membantu mengurangi potensi penyimpangan anggaran dan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Paryono, 2014).

Pengertian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sebuah aplikasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung berbagai proses penting dalam pemerintahan daerah, seperti perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan. SIPD berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan data dari berbagai sektor pemerintahan, yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara instansi terkait serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya daerah. Sebagaimana dijelaskan oleh Setyawan (2016), SIPD merupakan platform yang memungkinkan penyusunan dan pengelolaan dokumen perencanaan pembangunan daerah

secara sistematis dan berbasis data. Dengan adanya sistem ini, perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan, karena mengoptimalkan penggunaan informasi yang terintegrasi dari berbagai bidang pemerintahan yang saling terkait.

Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dikembangkan dengan tujuan utama untuk mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data dan terintegrasi antar sektor pemerintahan. Sebagai alat yang dapat menghubungkan berbagai informasi dari sektor-sektor terkait, SIPD bertujuan untuk menciptakan transparansi dalam penyusunan kebijakan dan anggaran. Menurut Nugroho dan Mardiasmo (2018), penggunaan SIPD dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses perencanaan serta penganggaran, meningkatkan transparansi anggaran, serta mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan di tingkat daerah.

Salah satu manfaat utama dari penerapan SIPD adalah kemampuannya dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan data yang terintegrasi dan dapat diakses secara *real-time*, pemerintah daerah dapat lebih cepat menyesuaikan kebijakan dan mengawasi penggunaan anggaran. Hal ini juga mendorong terciptanya partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam pengawasan kebijakan dan alokasi dana daerah (Hidayat & Sigit, 2020).

Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dalam perkembangan teknologi, penerapan sistem informasi seperti SIPD sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pemerintahan. Menurut Berman dan Thelen (2005), penggunaan teknologi dalam sektor pemerintahan mampu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Teknologi informasi

tidak hanya mempercepat proses pengambilan keputusan tetapi juga memudahkan proses pengawasan oleh pihak terkait, termasuk lembaga legislatif dan masyarakat.

SIPD sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan daerah menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu memperlancar penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi, dan penganggaran. Sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2011), teknologi informasi yang digunakan dalam SIPD memungkinkan adanya pengelolaan data yang lebih efisien, serta memberikan akses yang lebih terbuka terhadap informasi terkait perencanaan dan penggunaan anggaran daerah.

Pengertian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang sistematis dan terorganisir yang melibatkan identifikasi tujuan, pengumpulan data, analisis situasi, penetapan kebijakan, serta pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan dalam suatu wilayah atau negara. Menurut Mubyarto (1998), perencanaan pembangunan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, manusia, dan keuangan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat, untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, perencanaan pembangunan juga dapat dipandang sebagai alat untuk merancang masa depan dengan cara merumuskan berbagai langkah yang harus diambil untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan mengoptimalkan potensi yang ada di suatu daerah. Menurut Soemarno (2005), perencanaan pembangunan bukan hanya berkaitan dengan pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga mencakup rencana-rencana jangka panjang yang menyentuh berbagai aspek

kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki tujuan untuk menciptakan pembangunan yang terarah dan efisien dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah. Menurut Widodo (2011), tujuan utama dari perencanaan pembangunan adalah untuk merencanakan pencapaian pembangunan yang optimal, mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perencanaan yang matang, proses pembangunan dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan lebih mudah dipantau.

Manfaat dari perencanaan pembangunan tidak hanya terbatas pada pencapaian tujuan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor sosial lainnya. Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dan memandu alokasi sumber daya secara lebih efisien agar dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas. Menurut Samsudin (2014), perencanaan pembangunan yang baik akan membawa manfaat dalam hal pengelolaan sumber daya, peningkatan daya saing daerah, serta terciptanya pemerataan pembangunan yang lebih merata.

Jenis-Jenis Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan dapat dibedakan berdasarkan berbagai kriteria, seperti tingkatannya (makro atau mikro), cakupannya (jangka panjang atau jangka pendek), dan pendekatan yang digunakan (*top-down* atau *bottom-up*). Menurut Mankiw (2012), perencanaan pembangunan makro berfokus pada kebijakan pembangunan nasional, sementara perencanaan pembangunan mikro berfokus pada perencanaan pembangunan di tingkat daerah atau desa.

Selain itu, dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu

pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* merupakan model perencanaan yang dimulai dari tingkat pusat (pemerintah pusat) dan diteruskan ke daerah untuk dilaksanakan. Sebaliknya, pendekatan *bottom-up* dimulai dari bawah yakni dari masyarakat atau daerah yang mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi yang kemudian dibawa ke tingkat atas untuk disepakati bersama. Menurut Syarif (2010), pendekatan *bottom-up* lebih memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana tujuan utamanya adalah memberikan gambaran yang mendalam mengenai implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan di Bappeda Kabupaten Maybrat. Penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena yang sedang berlangsung, memahami dinamika kebijakan, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan SIPD di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengumpulkan data numerik, tetapi juga berfokus pada pengalaman, persepsi, dan praktik para pemangku kepentingan dalam penggunaan SIPD.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terbagi menjadi beberapa aspek utama. Pertama, penelitian berfokus pada bagaimana SIPD digunakan dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Maybrat, termasuk mekanisme integrasi data lintas sektor serta sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Kedua, penelitian ini juga menyoroti faktor pendukung dan penghambat

dalam implementasi SIPD, seperti kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dan kebijakan pendukung dari pemerintah daerah. Ketiga, penelitian berfokus pada strategi optimalisasi pemanfaatan SIPD dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas tata kelola pembangunan. Dengan fokus ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana SIPD mampu mendukung perencanaan pembangunan yang lebih akuntabel serta bagaimana tantangan yang ada dapat diatasi melalui kebijakan yang lebih adaptif.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fokus penelitian yang ingin menganalisis bagaimana SIPD digunakan dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Kabupaten Maybrat menjadi objek penelitian yang relevan karena menghadapi tantangan dalam aspek infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan konektivitas internet, yang secara langsung berpengaruh terhadap efektivitas implementasi SIPD. Adapun penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu, mencakup tahap pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan hasil penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta diskusi dengan pemangku kepentingan, sementara data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi terkait perencanaan pembangunan dan implementasi SIPD.

Untuk memperoleh data primer, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Maybrat. Narasumber utama dalam penelitian ini

mencakup pejabat dan staf Bappeda Kabupaten Maybrat, operator SIPD, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD yang bertugas dalam pengawasan pembangunan daerah, serta tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta kendala yang dihadapi dalam penggunaan SIPD sebagai alat perencanaan pembangunan. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan observasi langsung guna memahami bagaimana proses perencanaan dilakukan melalui SIPD, termasuk bagaimana aplikasi ini digunakan dalam menyusun kebijakan dan mengintegrasikan data pembangunan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan publikasi yang relevan. Dokumen yang digunakan mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta laporan evaluasi pembangunan daerah. Selain itu, regulasi terkait penerapan SIPD, seperti kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai sistem informasi pemerintahan daerah, juga digunakan sebagai bahan kajian.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis kualitatif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Tahap pertama adalah reduksi data, dimana data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber akan diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan kategori utama, seperti faktor pendukung implementasi SIPD, tantangan yang dihadapi, serta strategi optimalisasi sistem tersebut. Informasi yang tidak relevan akan dieliminasi agar analisis lebih fokus dan sistematis.
2. Tahap kedua adalah penyajian data, dimana hasil analisis disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau skema untuk memberikan gambaran lebih jelas

mengenai hubungan antarvariabel yang diteliti. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai efektivitas SIPD dalam meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Maybrat.

3. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, dimana temuan utama penelitian dirangkum untuk mengidentifikasi pola, tren, serta implikasi dari penggunaan SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah. Kesimpulan ini akan menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan SIPD guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perencanaan pembangunan.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam implementasi SIPD di Kabupaten Maybrat. Subjek penelitian meliputi pejabat Bappeda Kabupaten Maybrat, operator SIPD, perwakilan OPD, anggota DPRD, serta masyarakat atau tokoh lokal yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Masing-masing subjek memiliki peran yang berbeda dalam perencanaan pembangunan berbasis SIPD, sehingga perspektif yang diperoleh dari mereka akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Faktor Perencanaan Pembangunan melalui Aplikasi SIPD untuk Meningkatkan Akuntabilitas di Bappeda Kabupaten Maybrat

1. Identifikasi Permasalahan dan Potensi

Perencanaan pembangunan yang baik harus berbasis pada identifikasi permasalahan dan potensi daerah yang akurat. Tanpa pemetaan yang jelas, kebijakan yang dihasilkan tidak akan efektif dalam mengatasi tantangan daerah maupun mengoptimalkan potensi yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Kabupaten Maybrat menghadapi beberapa tantangan dalam perencanaan pembangunan, diantaranya:

- a) Minimnya infrastruktur dan aksesibilitas, terutama di daerah terpencil yang menghambat pelaksanaan program pembangunan.
- b) Keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung tata kelola pembangunan.
- c) Terbatasnya jaringan internet yang menjadi kendala dalam penerapan Aplikasi SIPD secara maksimal.
- d) Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada terbatasnya alokasi anggaran untuk pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dan implementasi program berbasis teknologi.

Di sisi lain, Kabupaten Maybrat juga memiliki potensi yang dapat dioptimalkan dalam perencanaan pembangunan, seperti:

- a) Sumber daya alam melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
- b) Komitmen kuat dari pemerintah daerah, terutama dalam digitalisasi sistem pemerintahan guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
- c) Dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui penerapan Aplikasi SIPD yang memungkinkan integrasi data pembangunan secara nasional.

Melalui pemanfaatan Aplikasi SIPD, Bappeda Kabupaten Maybrat berupaya memastikan bahwa permasalahan utama dapat diminimalkan dan potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

2. Tujuan dan Sasaran Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks Kabupaten Maybrat,

penggunaan Aplikasi SIPD memiliki beberapa tujuan strategis, diantaranya:

- a) Meningkatkan integrasi data lintas sektor, sehingga seluruh program pembangunan dapat tersinkronisasi dengan baik dan menghindari tumpang tindih kebijakan antar-OPD.
 - b) Memastikan kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
 - c) Mempercepat proses perencanaan dan pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang akurat, *real-time*, dan dapat diakses oleh pemangku kebijakan.
 - d) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan mengurangi praktik mal-administrasi serta memudahkan pengawasan oleh DPRD dan masyarakat.
 - e) Mengoptimalkan sistem *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan, sehingga program yang dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat yang telah terakomodasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
3. Penetapan Kebijakan dan Strategi Pencapaian Tujuan

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Bappeda Kabupaten Maybrat menerapkan kebijakan dan strategi yang dilakukan secara sistematis melalui berbagai tahap koordinasi dan pengambilan keputusan. Kebijakan yang diterapkan mencakup:

- a) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola Aplikasi SIPD melalui pelatihan teknis bagi ASN yang terlibat dalam perencanaan pembangunan.
- b) Penguatan koordinasi antar-pemangku kepentingan, baik di internal

pemerintah daerah maupun dengan DPRD dan pemerintah pusat.

- c) Pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal dengan memastikan bahwa infrastruktur pendukung (terutama akses internet) dapat digunakan dengan optimal.
 - d) Penyusunan regulasi dan pedoman teknis penggunaan SIPD guna menciptakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam perencanaan pembangunan berbasis digital.
4. Penerjemahan Rencana ke dalam Program yang Nyata
- Setelah kebijakan ditetapkan, tahapan berikutnya adalah menerjemahkan rencana pembangunan ke dalam program yang konkret dan dapat diimplementasikan. Proses ini melibatkan beberapa langkah:
- a) Pengolahan data hasil Musrenbang Kecamatan yang dikombinasikan dengan usulan dari Bupati dan DPRD untuk menghasilkan program prioritas.
 - b) Penyusunan program berdasarkan analisis kebutuhan dan potensi daerah, sehingga program yang dirancang memiliki urgensi dan dampak yang nyata bagi masyarakat.
 - c) Penyelarasan program dengan dokumen perencanaan jangka menengah, seperti RPJMD, agar kebijakan yang diterapkan bersifat berkelanjutan.

5. Proses Persetujuan Rencana

Proses persetujuan rencana pembangunan melalui SIPD melibatkan tahapan berikut:

- a) Musrenbang Kecamatan sebagai tahap awal dalam menyusun usulan program kerja.
- b) Musrenbang Kabupaten, dimana seluruh usulan dikompilasi dan disesuaikan dengan prioritas daerah.
- c) Penyampaian kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan politik, sehingga seluruh program memiliki dasar hukum yang kuat.

- d) Evaluasi oleh pemerintah provinsi, sebelum program dimasukkan ke dalam dokumen KUA-PPAS.

Faktor Pendukung dan Penghambat Perencanaan Pembangunan melalui Aplikasi SIPD di Bappeda Kabupaten Maybrat

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan implementasi SIPD didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- a) Kemudahan akses aplikasi yang memungkinkan perencanaan dilakukan secara *real-time*.
- b) Integrasi sistem yang kuat, sehingga memudahkan koordinasi lintas sektor dan kementerian.
- c) Keamanan data yang terjamin, karena sistem ini telah diuji keandalannya oleh berbagai lembaga terkait.
- d) Efisiensi anggaran, karena SIPD dikembangkan oleh pemerintah pusat tanpa membebani anggaran daerah.

2. Faktor Penghambat

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, implementasi SIPD juga menghadapi sejumlah kendala di Kabupaten Maybrat, seperti:

- a) Terbatasnya akses internet, terutama di daerah yang belum terjangkau jaringan yang stabil.
- b) Keterbatasan SDM dalam mengoperasikan sistem, sehingga diperlukan pelatihan intensif bagi pegawai yang bertanggung jawab.
- c) Kurangnya motivasi pegawai, akibat minimnya insentif dan tunjangan tambahan.
- d) Belum optimalnya fitur dalam aplikasi, yang terkadang menyebabkan beberapa proses masih harus dilakukan secara manual.

Penggunaan Aplikasi SIPD di Kabupaten Maybrat telah membawa berbagai manfaat dalam meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan. Meskipun masih terdapat kendala teknis dan administratif, upaya optimalisasi terus dilakukan melalui

peningkatan koordinasi, penguatan SDM, serta pengembangan kebijakan yang lebih adaptif terhadap tantangan daerah. Dengan strategi yang tepat, SIPD berpotensi menjadi solusi efektif dalam mendukung tata kelola pembangunan daerah yang lebih transparan, efisien, dan berbasis data.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Bappeda Kabupaten Maybrat, dapat disimpulkan bahwa penggunaan SIPD memiliki potensi besar dalam meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah. Meskipun Kabupaten Maybrat menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), serta kendala akses internet. Dalam hal ini, aplikasi SIPD memberikan manfaat signifikan dalam hal integrasi data, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.

SIPD memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antar sektor pemerintahan, mempercepat proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta mendukung penerapan sistem perencanaan *bottom-up* yang memastikan kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur guna mengoptimalkan penerapan SIPD, antara lain melalui pelatihan kepada aparatur dan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Namun, implementasi SIPD masih menghadapi beberapa kendala, seperti terbatasnya akses internet di daerah terpencil, kurangnya motivasi pegawai, dan belum optimalnya fitur dalam aplikasi. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan SDM, serta pembaruan fitur aplikasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, dengan kebijakan yang tepat dan strategi implementasi yang berkelanjutan, SIPD berpotensi menjadi alat yang efektif untuk mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, efisien, dan berbasis data, serta dapat meningkatkan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Maybrat.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Bappeda Kabupaten Maybrat, berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Akses Internet: Mengingat terbatasnya akses internet di daerah terpencil yang menjadi kendala utama dalam implementasi SIPD, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dan penyedia layanan telekomunikasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan internet. Peningkatan akses internet yang stabil akan memungkinkan optimalisasi penggunaan SIPD, serta mempercepat proses perencanaan dan pelaporan yang lebih efisien.
2. Pelatihan dan Penguatan SDM: Keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan teknologi menjadi hambatan penting. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah secara rutin mengadakan pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya di Bappeda. Pelatihan ini tidak hanya mencakup penggunaan aplikasi SIPD, tetapi juga penguatan kompetensi dalam manajemen data dan perencanaan pembangunan berbasis teknologi.
3. Optimalisasi Fitur Aplikasi SIPD: Meskipun SIPD memberikan banyak manfaat, beberapa fitur aplikasi masih

belum optimal dan memerlukan perbaikan. Pengembangan lebih lanjut terhadap fitur-fitur aplikasi yang ada, seperti integrasi data antar OPD dan sistem pengawasan yang lebih efisien, dapat meningkatkan kinerja dan memudahkan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa aplikasi SIPD selalu diperbarui dan dapat memenuhi kebutuhan penggunaannya.

4. Penguatan Kebijakan dan Regulasi: Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan dan regulasi yang mengatur penggunaan SIPD di Bappeda dan OPD terkait lainnya. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan penerbitan pedoman teknis penggunaan aplikasi SIPD akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan dapat mematuhi prosedur yang sudah ditetapkan dan menjalankan tugas mereka dengan lebih terstruktur.

REFERENSI

- Berman, E., & Thelen, P. (2005). *Government in the Digital Age: Technology, Transparency, and Accountability*. Oxford University Press.
- Dunning, T. (2009). Technology and Governance: A Study of the Role of ICT in Enhancing Accountability. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 19(2), 369–384.
- Heeks, R. (2006). *Implementing e-Government: A Handbook for Public Administration*. Institute for Development Policy and Management, University of Manchester.
- Hidayat, S., & Sigit, T. (2020). Increasing Public Participation in Budgeting through SIPD in Local Government. *Journal of Public Sector Innovations*, 4(3), 213–220.
- Mardiasmo, D. (2011). *Perencanaan Pembangunan Berbasis Teknologi*

- Informasi dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mubyarto, M. (1998). *Perencanaan Pembangunan di Indonesia: Pendekatan dan Implementasinya*. Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial).
- Mulgan, R. (2000). Accountability and Transparency: Concepts and Issues. *Australian Journal of Public Administration*, 59(1), 17–27.
- Nugroho, Y., & Mardiasmo, D. (2018). Integrating Data for Regional Development Planning Using SIPD. *Indonesian Journal of Public Administration*, 10(2), 45–56.
- Paryono, P. (2014). Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Publik*, 1(2), 24–31.
- Peters, B. G. (2000). Governance and Accountability: Political Theory and Public Administration. *Public Administration Review*, 60(6), 591–597.
- Robinson, M. (2008). The Political Economy of Accountable Governance. *Development Policy Review*, 26(5), 617–640.
- Samsudin, I. (2014). Manfaat Perencanaan Pembangunan dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 10(1), 45–52.
- Setyawan, E. (2016). *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD): Konsep dan Aplikasi dalam Pengelolaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: UGM Press.
- Soemarno, S. (2005). *Perencanaan Pembangunan untuk Masa Depan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Syarif, M. (2010). *Pendekatan Bottom-up dalam Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Widodo, W. (2011). Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 18(3), 200–210.

